

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keamanan Nasional

Secara tradisional, keamanan diartikan pada istilah militer dan berfokus pada melindungi negara dari hal-hal yang dapat mengancam kepentingan nasional (Amaritasari, 2015). Keamanan nasional biasanya dikaitkan dengan militer. Karena masalah ini, banyak orang telah tersesat dan menganggap keamanan sebagai fenomena militer, terutama dalam bentuk kepemilikan peralatan militer. Padahal tidak hanya itu, keamanan nasional juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi perlindungan yang diupayakan atau dipertahankan oleh politisi untuk melindungi berbagai komponen politik dari ancaman internal dan eksternal. (McNamara, 1968). Kebijakan keamanan nasional yang layak harus memberikan perlindungan yang memadai untuk penerapan nilai-nilai ini, di mana pun nilai-nilai itu ditemukan, penggunaan militer dan non-militer, bahaya dalam dan luar negeri adalah tujuan dari semua bentuk kekuatan nasional (Taylor, 1976). Berdasarkan definisi diatas, didapatkan kesimpulan bahwa keamanan nasional adalah suatu upaya untuk melindungi serta menjaga keutuhan wilayah negara, masyarakat dan sebagainya dari segala ancaman militer maupun non militer.

Perumusan dan penentuan grand strategy suatu negara mengacu pada kepentingan nasional. Stabilitasnya keamanan nasional menjadi syarat untuk pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional yang lancar. Pendidikan, pembangunan ekonomi, dinamika politik, kesejahteraan sosial, sampai interaksi antar masyarakat yang dinamis mempengaruhi keamanan nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Terdapat beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat yang termasuk kedalam ruang lingkup keamanan nasional, yaitu (Buzan & Hansen, 2009; Mukhtar, 2011):

a. Keamanan insani

Kondisi dinamis yang menjamin hak-hak dasar setiap individu warga negara terhadap berbagai ancaman di bidang keamanan nasional. Manusia harus menjadi objek utama keamanan sehingga permasalahan keamanan insani juga meliputi kemiskinan, keterbelakangan, kelaparan, dan ancaman lain yang mengganggu integritas dan potensi manusia.

b. Keamanan publik

Terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelenggaraan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum menciptakan kondisi keamanan nasional yang dinamis.

c. Keamanan ke dalam

Suatu kondisi dinamis yang menjamin terpeliharanya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan seluruh bangsa dan negara dari ancaman dalam negeri.

d. Keamanan keluar

Dalam rangka mewujudkan keamanan nasional di Indonesia, menjamin terpeliharanya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kondisi dinamis bagi perlindungan seluruh negara dari ancaman asing.

2.1.2 Bencana

Bencana diartikan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau tidak wajar dan buatan manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis (UU Nomor 24 Tahun 2007). Bencana juga didefinisikan sebagai gangguan parah terhadap kegiatan masyarakat yang menyebabkan kerusakan fisik, ekonomi atau lingkungan yang meluas terhadap kehidupan manusia dan melebihi kemampuan masyarakat yang terlibat untuk merespons dengan

sumber daya mereka sendiri (International Strategy for Disaster Reduction, 2004). Pengertian lain dari bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat meningkatkan korban jiwa dan/atau kerusakan, harta benda, infrastruktur, layanan kritis atau kerugian mata pencaharian di luar kapasitas normal (Coburn, Spence, & Pomonis, 1994). Oleh karena itu secara umum dapat disimpulkan, bencana adalah keadaan atau peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat dan dapat mengakibatkan kerusakan seperti sarana dan prasarana sampai struktur sosial yang dapat mengancam kehidupan masyarakat.

Bencana disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya (Nurjanah *et al.*, 2012):

- a. Bahaya (*Hazard*), merupakan fenomena alam atau buatan manusia yang dapat mengancam kehidupan manusia, kerusakan harta benda, atau kerusakan lingkungan. Bahaya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Dengan kata lain, itu adalah bahaya alam yang terdiri dari zat geologis, hidrologis, meteorologis, biologis, dan lingkungan. Bencana buatan manusia, di sisi lain, terdiri dari kegagalan teknis, kerusakan, lingkungan dan konflik.
- b. Kerentanan (*Vulnerability*), yaitu suatu kondisi sosial yang tidak memungkinkan untuk mengatasi ancaman bahaya. Kerentanan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:
 - 1) Kerentanan fisik, yaitu kondisi fisik yang mampu menyebabkan risiko tertentu seperti persentase luas bangunan, kepadatan bangunan, jaringan listrik, persentase panjang jalan dan rel.
 - 2) Kerentanan sosial, yaitu gambaran dari tingkat kerawanan sosial dalam penanggulangan bencana seperti kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan proporsi penduduk berusia di bawah 5 tahun sampai lanjut usia.

- 3) Kerentanan ekonomi, yaitu gambaran dari keadaan tingkat kerentanan ekonomi menghadapi ancaman bencana alam (misalnya persentase rumah tangga yang bekerja di sektor rentan dan persentase rumah tangga miskin).
 - 4) Kerentanan lingkungan, yaitu gambaran dari suatu syarat taraf kerentanan lingkungan dalam menghadapi bencana mencakup ketersediaan atau kerusakan sumber daya lahan, sumber daya udara dan sumber daya air.
- c. Risiko bencana (*Disaster Risk*)

Risiko bencana merupakan interaksi risiko yang ada dan tingkat kerentanan wilayah. Secara umum, hazard merepresentasikan kemungkinan terjadinya bencana alam, baik yang alami maupun yang tidak alami. Kerentanan menunjukkan kerentanan suatu masyarakat dalam menghadapi ancaman. Semakin tinggi risiko dan kerentanan, semakin tinggi pula risiko bencana. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan mengurangi kerentanan karena relatif lebih mudah daripada mengurangi atau meminimalkan risiko sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana dapat dicapai dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan untuk merespons risiko.

Berdasarkan jenisnya, bencana dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (UU No. 24 Tahun 2007):

- a. Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa tidak wajar, antara lain kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, wabah, dan wabah penyakit.

- c. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, termasuk konflik sosial antar kelompok atau masyarakat, dan terorisme.

2.1.3 Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah proses dinamis, berkesinambungan dan terpadu yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tindakan yang terkait dengan pengamatan dan analisis bencana meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007). Selanjutnya, manajemen bencana dijelaskan sebagai pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang mencakup perumusan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, dan pemulihan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terpadu untuk melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana (PP Nomor 21 Tahun 2008). Hal tersebut sejalan dengan pengertian bahwa manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling* (Nurjanah, et al., 2012). Pendapat lain menyebutkan bahwa manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi seluruh kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan (Ramli, 2010). Manajemen bencana diharapkan dapat memberikan informasi kepada mengenai risiko bencana kepada masyarakat dan pihak terkait, mencegah atau meminimalkan jumlah korban dan kerugian materiil, mampu mengurangi penderitaan sebagai dampak dari bencana, mempercepat pemulihan pasca bencana, serta memberikan perlindungan bagi pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana (Sobirin, 2012).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dibedakan menjadi tiga tahap yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana (UU No. 24 Tahun 2007):

a. Tahap Pra Bencana

1) Pencegahan (*prevention*)

Suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah atau menghilangkan bencana.

2) Mitigasi (*mitigation*)

Mitigasi adalah upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas merespon bencana.

3) Kesiapsiagaan (*preparedness*)

Kesiapsiagaan adalah berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mengantisipasi bencana secara terorganisir dan tepat guna.

4) Peringatan Dini (*early warning*)

Aktivitas memberikan peringatan lebih awal mengenai kemungkinan terjadi bencana kepada masyarakat. Peringatan dini diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang terkait pemberian informasi tersebut.

b. Tahap Saat Terjadi Bencana

1) Tanggap Darurat (*response*).

Serangkaian aktivitas yang langsung dilakukan buat menangani efek buruk. Aktivitas tersebut mencakup penyelamatan korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, proteksi, pengungsian, penyelamatan, dan pemulihan sarana prasarana.

2) Bantuan Darurat (*relief*).

Suatu usaha untuk memberikan bantuan terkait pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Tahap Pasca Bencana

1) Pemulihan (*recovery*).

Serangkaian aktivitas untuk memfungsikan kembali institusi, infrastruktur, dan fasilitas untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana alam.

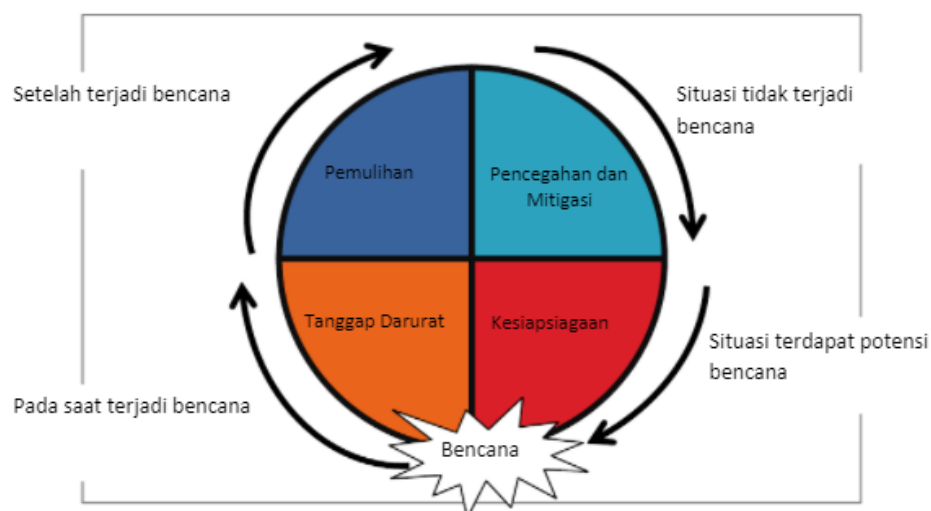
2) Rehabilitasi (*rehabilitation*).

Peningkatan dan pemulihan semua aspek pelayanan masyarakat dan pemerintahan ke tingkat yang sesuai di daerah terdampak bencana alam, dan pemulihan fungsi normal semua aspek pemerintahan.

3) Rekonstruksi (*reconstruction*).

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan upaya yang terencana dan berkesinambungan untuk memulihkan seluruh sarana prasarana dan sistem kelembagaan. Ruang lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri dari program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Terdapat pendapat lain terkait tahapan dalam penanggulangan bencana seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1 tersebut (Triutomo, *et.al.*, 2011):



Gambar 2.1 Tahapan Penanggulangan Bencana

Sumber: Triutomo *et.al.* (2011)

Gambar 2.1 memperlihatkan terdapat kuadran-kuadran yang merupakan tahapan-tahapan dalam penanggulangan bencana yang tidak berarti bahwa dalam praktek tiap-tiap kuadran dilakukan secara berurutan. Pada fase tanggap darurat yang dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana ketika diprediksi bencana akan segera terjadi, meskipun kejadian bencana belum terjadi, namun pada tahap ini sudah dapat dilakukan upaya-upaya tanggap darurat seperti evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian pangan, sandang, layanan kesehatan, dan sebagainya. Dalam situasi ini perlu dipahami bahwa meskipun telah dilakukan kegiatan pada tahap tanggap darurat, namun terdapat dua kemungkinan situasi yaitu benar-benar terjadi bencana atau tidak terjadi bencana.

Sebagai sebuah siklus, setiap tahapan penanggulangan bencana dilakukan dengan kegiatan yang berbeda-beda, misalnya pada tahap pemulihan kegiatan utamanya adalah pemulihan, namun kegiatan pencegahan dan mitigasi juga dilakukan untuk memprediksi bencana yang akan datang. Gambar 2.1 dapat dijelaskan dalam 4 (empat) tahapan atau fase, yaitu:

- a. Fase pencegahan dan mitigasi, yaitu dilakukan pada situasi normal atau tidak ada bencana yang terjadi guna meminimalkan dampak negatif dari suatu bencana.
- b. Fase kesiapsiagaan, yaitu dilakukan ketika bencana mungkin terjadi dengan merencanakan bagaimana merespons dan menanggulangi bencana.
- c. Fase tanggap darurat, yaitu dilakukan ketika terjadi bencana guna mengurangi dampak negatif bencana.
- d. Fase pemulihan, yaitu dilakukan setelah bencana guna mengembalikan masyarakat ke keadaan normal.

Siklus manajemen bencana yang berupa tahapan/fase penanggulangan bencana dapat bermanfaat dalam pengurangan atau pencegahan potensi bencana, perumusan kebijakan saat terjadi bencana

dan pertimbangan dalam prosedur pemulihan pascabencana. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan

2.1.4 Kesiapsiagaan

Umumnya ketika terjadi bencana alam maka sistem lingkungan manusia akan selalu dilibatkan. Jika wilayah terdampak tidak terpengaruh oleh masyarakat, proses alam bencana tidak akan mengancam masyarakat. Banyak pihak yang tidak menyadari pentingnya penanganan bencana yang tepat. Salah satu penyebabnya adalah karena bencana yang tidak menentu sehingga masyarakat tidak mengetahui kapan bencana itu akan terjadi. Masyarakat seringkali tidak memedulikannya, dan gagal melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen bencana yang bertujuan untuk (Ramli, 2010):

- a. Bersiap untuk setiap bencana atau kejadian tak terduga.
- b. Mengurangi kemungkinan kerugian dan korban dari dampak bencana atau kejadian.
- c. Meningkatkan kesadaran bencana di antara semua pihak dalam komunitas atau organisasi sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses tanggap darurat.
- d. Mengurangi korban dan penderitaan yang dialami masyarakat dengan melindungi masyarakat dari bahaya atau dampak negatif bencana.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan rangkaian tindakan untuk mengantisipasi bencana dengan mengorganisir dan mengambil tindakan yang efektif (UU Nomor 24 Tahun 2007). Kesiapsiagaan juga diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya secara tepat dan cepat dalam menghadapi bencana (Aminudin, 2013). Kesiapsiagaan termasuk dalam proses manajemen bencana. Peningkatan kesiapsiagaan bersifat pro-aktif dan menjadi salah

satu elemen penting dari rangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006). Sehingga kesiapsiagaan dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka melakukan persiapan atau antisipasi menghadapi bencana. Sehingga, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat dapat mengambil kebijakan dan tindakan yang efektif. Terdapat lima parameter dalam kesiapsiagaan, yaitu (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006):

a. Pengetahuan Bencana

Pengetahuan menjadi faktor utama dalam kesiapsiagaan bencana. Pengetahuan berkaitan dengan proses pembelajaran, pengalaman langsung maupun tidak langsung yang diperoleh melalui observasi, pendengaran, dan penglihatan. Pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi sikap dan kesadaran masyarakat dalam persiapan menghadapi bencana, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

b. Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana

Kebijakan kesiapsiagaan bencana alam sangat penting dan merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan yang secara serius mempengaruhi kesiapsiagaan bencana yaitu pendidikan, rencana darurat, sistem peringatan dini bencana, dan mobilisasi sumber daya, termasuk dana, organisasi manajemen, sumber daya manusia, dan fasilitas yang diperlukan untuk kondisi darurat bencana. Strategi ditulis dalam berbagai bentuk, namun jika secara khusus dituangkan dalam regulasi seperti SK atau Perda, dengan *job description* yang jelas akan lebih masuk akal. Untuk mendapatkan implementasi kebijakan yang terbaik, diperlukan pedoman operasional.

c. Rencana Tanggap Darurat

Perencanaan adalah bagian penting dari kesiapsiagaan bencana, terutama terkait evakuasi, penyelamatan dan

pertolongan, sehingga korban dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting, terutama pada saat bencana dan beberapa hari pertama setelah bencana baru datang bantuan pemerintah dan bantuan dari luar.

d. Peringatan Dini Bencana

Sistem tersebut mencakup sinyal peringatan bencana, dimana masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi korban jiwa, kerusakan harta benda dan lingkungan.

e. Mobilisasi Sumberdaya

Sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia dan pendanaan untuk keadaan darurat, potensi yang mendukung atau seharusnya menjadi penghambat kesiapsiagaan bencana alam. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya merupakan faktor penting.

Untuk mengukur kesiapsiagaan, maka parameter tersebut diubah menjadi indikator yang dapat dihitung. Jumlah indikator disesuaikan dengan parameter dan kebutuhan seperti berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kesiapsiagaan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Mengantisipasi Bencana Alam

| No. | Parameter | Variabel | Indikator |
|-----|-------------|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pengetahuan | Pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan dampak bencana yang ditimbulkan b. Menjelaskan tipe-tipe, sumber, penyebab, dan skala bencana c. Menjelaskan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana alam d. Menjelaskan kondisi dan rencana fasilitas kritis |
| 2. | Kebijakan | Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana b. Terdapat rencana aksi untuk tanggap darurat c. Terdapat alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana d. Terdapat kebijakan lain yang mendukung kesiapsiagaan seperti RTRW, Renstra, IMB, SNI |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-------------------------|--|--|
| | | Peraturan | e. Terdapat peraturan terkait organisasi pengelola bencana dan prosedur tetap pelaksanaan f. Terdapat peraturan terkait tempat evakuasi dan gedung/bangunan untuk penyelamatan sementara, pengecekan dan pemeliharaan gedung tempat evakuasi g. Terdapat peraturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan, penyimpanan dan distribusi dalam keadaan darurat) dan protap pelaksanaan h. Terdapat peraturan terkait sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan |
| 3. | Rencana Tanggap Darurat | Organisasi pengelola bencana | a. Tersedianya divisi pengelola bencana b. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab anggota organisasi dalam bentuk prosedur tetap pelaksanaan |
| | | Rencana evakuasi | c. Tersedia tempat evakuasi untuk pengungsian d. Tersedia peta bahaya dan peta evakuasi e. Tersedia rambu-rambu tanda bahaya dan rambu jalur evakuasi f. Terdapat rencana untuk mensosialisasikan peta/tempat/bangunan/rute evakuasi kepada masyarakat |
| | | Posko bencana | g. Tersedia posko bencana dan protap pelaksanaan h. Tersedia nomor <i>hotline</i> informasi bencana |
| | | Pertolongan pertama, penyelamatan, keselamatan, dan keamanan | i. Tersedia rencana untuk pertolongan pertama korban (obat-obatan, tenaga medis, peralatan/ambulan) j. Tersedia rencana penyelamatan korban bencana dan transportasi/sistem ambulan k. Tersedia unit SAR dan protap |
| | | Pemenuhan kebutuhan dasar | l. Tersedia data alokasi bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar m. Terdapat daftar tempat penyimpanan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kebutuhan dasar n. Tersedia prosedur pengadaan bahan dan perlengkapan kebutuhan dasar dalam keadaan darurat o. Tersedia prosedur untuk distribusi bahan dan perlengkapan dalam keadaan darurat |
| | | Peralatan dan perlengkapan | p. Tersedia peralatan dan perlengkapan untuk keadaan darurat (tenda, dapur umum, MCK) |
| | | Latihan dan simulasi/gladi | q. Terdapat latihan dan simulasi secara regular (publik dan instansi) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---------------------------|---|--|
| 4. | Sistem Peringatan Bencana | Kearifan lokal | a. Adanya pengakuan terhadap sistem peringatan bencana secara tradisional dan lokal |
| | | TWS/Sistem Peringatan Tsunami | b. Tersedia teknologi sistem peringatan bencana dan protap pelaksanaan |
| | | Instalasi | c. Terdapat instalasi peralatan untuk peringatan bencana d. Terdapat prosedur pemeliharaan sistem peringatan bencana |
| | | Diseminasi peringatan dan mekanisme | e. Tersedia sistem penyebarluasan peringatan bencana dan protap pelaksanaan |
| | | Latihan dan simulasi | f. Terdapat pelatihan/seminar yang diikuti oleh staf |
| 5. | Mobilisasi Sumber Daya | Penataan kelembagaan | a. Terdapat kesepakatan instansi pemerintah untuk memobilisasi sumber daya (dana/peralatan/petugas) dan protap pelaksanaan b. Terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dengan masyarakat di lokasi bencana c. Tersedia mekanisme untuk mengelola sumber daya dari luar (pihak swasta, donator, NGO, relawan) |
| | | Sistem komando | d. Terdapat komando untuk keadaan darurat dan protap sistem komando |
| | | Komunikasi dan koordinasi antar <i>Stakeholder</i> yang relevan | e. Tersedia protokol untuk komunikasi dan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah f. Tersedia protokol untuk komunikasi publik yang berkaitan dengan informasi keadaan darurat (secara regular dan bertanggung jawab) g. Tersedia jaringan kerja di luar pemerintah untuk memobilisasi sektor swasta dan NGO dalam merespon keadaan darurat bencana |
| | | Sumber Daya Manusia | h. Terdapat personil yang telah terlatih dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem pengelolaan tanggap darurat |
| | | Sumber Daya Alam | i. Telah teridentifikasi jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif pada saat darurat bencana |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|--|---|
| | | Bimbingan teknis dan penyediaan materi | j. Tersedia bimbingan teknis/pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat k. Tersedia materi dan bahan yang mudah diakses untuk kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan |
| | | | l. Telah dilakukan sosialisasi materi dan bahan kesiapsiagaan untuk masyarakat dan wisatawan m. Tersedia informasi/dokumen bencana alam yang pernah terjadi |
| | | Pendanaan | n. Tersedia prosedur untuk mengalokasikan dan memobilisasi dana kesiapsiagaan bencana |
| | | Pemantauan dan evaluasi (monev) | o. Tersedia rencana untuk melakukan monev dan menindaklanjuti hasil monev |

Sumber: LIPI-UNESCO/ISDR (2006), diolah oleh peneliti (2021)

2.1.5 Bencana Tsunami

Istilah tsunami berasal dari Bahasa Jepang yaitu *Tsu* yang berarti pelabuhan dan *nami* yang memiliki arti gelombang laut. Sehingga tsunami dapat diartikan sebagai serangkaian gelombang yang umumnya diakibatkan oleh aktivitas di dasar laut (Dudley & Lee, 2006). Kedalaman perairan sangat mempengaruhi kecepatan tsunami. Percepatan dan perlambatan gelombang tsunami akan sesuai dengan bertambah dan berkurangnya kedalaman dasar laut. Hal tersebut juga akan mempengaruhi arah pergerakan gelombang yang dapat menjadi terfokus maupun menyebar. Gelombang tsunami dapat bergerak di kecepatan 500-1.000 km/jam di laut dalam. Saat gelombang tsunami tiba di dekat pantai, maka kecepatannya akan melambat menjadi beberapa puluh km/jam. Selain itu, ketinggian gelombang tsunami juga dipengaruhi oleh kedalaman air. Selain itu, tsunami dapat menimbulkan dampak terhadap berbagai sektor seperti sektor kemanusiaan, sosial, dan ekonomi di masyarakat (UNESCO-IOC, 2006). Sebagian besar tsunami yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh gempa tektonik, jalur subduksi yang terdapat di bagian barat Sumatera, sepanjang selatan Jawa, sampai ke laut Banda (Marwanta, 2005). Terdapat beberapa aktivitas geologis yang terjadi di laut yang dapat menimbulkan tsunami, yaitu:

a. Gempa bumi

Sebagian besar tsunami terjadi akibat adanya penunjaman di dasar Samudra yang juga menimbulkan gempa bumi (Dudley & Lee, 2006). Tsunami yang dipicu oleh gempa bumi di dasar laut memiliki beberapa syarat yaitu episenter berada di dasar laut, adanya gempa di kedalaman kurang dari 30 km dengan kekuatan lebih dari 6 Skala Richter (SR), dan terjadi dislokasi batuan secara vertikal (Mustafa, 2010).

b. Tanah longsor

Berdasarkan penyebabnya, tsunami yang disebabkan oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuh air (danau atau laut) maupun longsoran dari darat yang masuk ke dalam tubuh air adalah sebanyak 1% (Fauzi, Hunainah, & Humaedi, 2020). Longsor dapat terjadi karena disebabkan oleh gempa bumi, hujan, badai, maupun adanya penumpukan sedimen pada lereng yang terjadi secara terus menerus. Terdapat beberapa lingkungan yang mudah terpengaruh oleh longsor yang dapat menyebabkan tsunami seperti delta sungai dan lereng curam bawah laut (Dudley & Lee, 2006).

c. Letusan gunung api

Aktivitas geologi yang berkaitan dengan letusan gunung api juga dapat menyebabkan tsunami. Tsunami akibat letusan gunung api juga dapat mengakibatkan korban jiwa. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak yang dilalui tsunami dan kerusakan yang ditimbulkan oleh sepanjang jalur yang dilaluinya (Dudley & Lee, 2006). Tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik adalah sebanyak 9% (Fauzi, Hunainah, & Humaedi, 2020). Meskipun jarang terjadi, namun erupsi gunung api yang sangat kuat dapat menyebabkan volume air yang sangat banyak berpindah dan menimbulkan gelombang tsunami yang bersifat sangat merusak. Letusan vulkanik dasar laut terjadi ketika air laut dingin bertemu

dengan magma vulkanik panas. Air dingin dan magma panas akan menimbulkan reaksi yang hebat sehingga menghasilkan letusan-letusan uap. Letusan uap bawah laut di kedalaman kurang dari 450 meter dapat mengakibatkan terjadinya gangguan air hingga ke permukaan dan menghasilkan tsunami (Dudley & Lee, 2006).

2.1.6 Pariwisata

Pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta dimana *pari* berarti sempurna, lengkap, tertinggi, sedangkan *wisata* berarti perjalanan. Sehingga pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang lengkap atau sempurna (Arjana, 2015). Pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (UU No. 10 Tahun 2009). Pengertian lain dari pariwisata adalah pergerakan orang-orang dari satu tempat ke tempat baru yang belum atau sudah pernah dikunjungi tetapi tidak sering dan tidak teratur (Simanjutak, Tanjung, & Nasution, 2017). Pariwisata juga memiliki arti sebagai suatu sistem yang menghubungkan lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, serta industri dalam upaya memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat di luar lingkungan rumahnya. (Ismayani *et al.*, 2015). Pariwisata berkaitan dengan konsep perjalanan. Seseorang mengubah tempat tinggal sementara untuk alasan apa pun, misalnya untuk bersenang-senang dan mempelajari sesuatu. motivasi (Gamal, 1997). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpergian ke suatu tempat dalam waktu singkat dan dengan tujuan tertentu.

Pariwisata dapat dikelompokkan menurut letak geografis, pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, alasan melakukan perjalanan, waktu berkunjung, dan menurut objeknya seperti berikut (Yoeti, 1996):

- a. Menurut letak geografis:
 - 1) Wisata lokal
 - 2) Wisata regional
 - 3) Wisata nasional
 - 4) Wisata regional-internasional
 - 5) Wisata dunia
- b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
 - 1) Wisata aktif
 - 2) Wisata pasif
- c. Menurut alasan perjalanan
 - 1) Wisata bisnis
 - 2) Wisata berlibur
 - 3) Wisata edukasi
- d. Menurut waktu berkunjung
 - 1) Wisata musiman
 - 2) Wisata sesekali
- e. Menurut objek
 - 1) Wisata budaya
 - 2) Wisata penyembuhan
 - 3) Wisata komersial
 - 4) Wisata olahraga
 - 5) Wisata politik
 - 6) Wisata sosial
 - 7) Wisata religi

Pariwisata adalah salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang pesat. Kegiatan wisata dinilai memiliki peranan yang semakin penting dalam mewujudkan kehidupan sosial dan perekonomian yang berkelanjutan dan dinamis (Rosyidie, 2004). Pariwisata adalah industri yang kompleks. Perkembangan dari industri pariwisata mampu memberikan pengaruh berantai pada berbagai sektor kehidupan masyarakat dimana industri tersebut berkembang (Sutrisnawati, 2018). Daya tarik wisata atau

objek wisata adalah suatu potensi yang dapat mendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Objek wisata bersifat statis, terikat dengan tempat, dan dapat dijamah. Objek wisata dibagi menjadi objek wisata alam dan objek wisata karya manusia (Suwena & Widyatmaja, 2017):

- a. Objek wisata alam yang meliputi pantai, gunung atau bukit, hutan, pulau, danau, air terjun, goa, pemandangan alam, lembah, cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan sebagainya.
- b. Objek wisata karya manusia yang meliputi situs-situs sejarah, candi, monument, tugu, bangunan dengan arsitektur yang khas, bangunan atau lokasi bersejarah, bangunan lain yang memiliki nilai tertentu.

Sebagai fenomena alam, terjadinya bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, sehingga mampu memberikan dampak yang negatif pada sektor pariwisata. Bencana yang terjadi di kawasan wisata akan menimbulkan kerugian atau korban jiwa yang besarnya bergantung pada karakteristik hazard, kerentanan, dan ketahanan suatu kawasan wisata. Karakteristik kawasan wisata yang menentukan tingkat kerentanan meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, komposisi penduduk dan wisatawan menurut usia dan Pendidikan, jarak kawasan wisata terhadap sumber hazard, struktur guna lahan, karakteristik fisik, kesiapan penduduk, informasi tentang hazard, sistem peringatan dini, dan sebagainya (Rosyidie, 2004). Hubungan antara pariwisata dan bencana alam bersifat negatif ketika bencana alam dapat mengubah minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata karena faktor keamanan (Sutrisnawati, 2018). Dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam terhadap kawasan wisata adalah jiwa terancam, tidak berfungsinya jaringan jalan, fasilitas ekonomi, kelangkaan air bersih, risiko terserang penyakit. Selain itu, dampak dari bencana alam yang terjadi di kawasan wisata juga

dapat mengakibatkan trauma pada wisatawan dan penduduk lokal (Rosyidie, 2004).

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna mendapatkan referensi yang mendukung sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama berjudul Kesiapsiagaan Pengelola Wisata dan Pedagang dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami di Kawasan Wisata Pantai di Kota Pariaman yang diteliti oleh Andika Rahman dan Triyatno pada tahun 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian tersebut adalah, Tingkat kesiapsiagaan pengelola wisata dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan wisata pantai di Kota Pariaman berada pada kategori siap, sedangkan tingkat kesiapsiagaan pedagang dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami berada pada kategori kurang siap. Persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti mengenai kesiapsiagaan bencana tsunami di kawasan wisata pantai. Perbedaannya adalah, penelitian ini meneliti kesiapsiagaan pengelola wisata dan pedagang, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang kedua berjudul Kesiapsiagaan Masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu Terhadap Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang diteliti oleh Chrisantum Aji Paramesti pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan hasil penelitian Kesiapsiagaan masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami berada dalam kondisi tidak siap. Hal ini disebabkan masyarakat banyak yang belum mengetahui kerentanan wilayahnya terhadap bencana. Selain itu, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat membuat masyarakat belum terlalu jauh memikirkan untuk mengupayakan kesiapsiagaan dalam keluarga, terutama dalam hal penyediaan peralatan dan perlengkapan

darurat serta pertimbangan pembuatan bangunan tempat tinggal yang tahan gempa dan/atau tsunami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti kesiapsiagaan masyarakat, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang ketiga berjudul Peran BPBD Kabupaten Bantul dalam Mitigasi Bencana Alam yang diteliti oleh Furqon Hasani pada tahun 2015. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu dalam program BPBD, mitigasi ada dua jenis yaitu mitigasi structural dan mitigasi non structural. Mitigasi structural yaitu pembangunan secara fisik seperti pembuatan tanggul banjir, pemasangan alat peringatan dini, pembuatan shelter dan jalur evakuasi. Sedangkan untuk non structural, BPBD Bantul melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat, serta membuat Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai peran BPBD. Sedangkan, perbedaannya adalah, penelitian ini meneliti mengenai mitigasi bencana sedangkan penelitian yang akan diteliti saat ini adalah kesiapsiagaan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian ke empat berjudul Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat yang diteliti oleh Ujang Mison pada tahun 2014. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun Pacitan belum pernah terdampak tsunami secara langsung, tetapi pemerintah menyediakan informasi yang tepat kepada masyarakat dan memberikan tindak lanjut yang bermanfaat seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat. Yang perlu lebih ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas informasi kebencanaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kontrol dan monitoring atas kebijakan dan program

pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan untuk menjamin masyarakat menerima dan melaksanakan program pemerintah dengan baik sekaligus menjangkir masalah yang timbul di masyarakat terkait risiko bencana tsunami demi pembuatan kebijakan dan program pengurangan risiko bencana tsunami yang lebih tepat sasaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah topik penelitian bencana yang sama-sama membahas terkait bencana tsunami, selain itu subjek yang diteliti sama-sama pemerintah lokal. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Andika Rahman dan Triyatno (2020) | Kesiapsiagaan Pengelola Wisata dan Pedagang dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami di Kawasan Wisata Pantai di Kota Pariaman | Tingkat kesiapsiagaan pengelola wisata dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan wisata pantai di Kota Pariaman berada pada kategori siap, sedangkan tingkat kesiapsiagaan pedagang dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami berada pada kategori kurang siap. | <ul style="list-style-type: none"> • Meneliti mengenai kesiapsiagaan bencana tsunami • lokasi yang diteliti adalah kawasan wisata pantai | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini meneliti kesiapsiagaan pengelola wisata dan pedagang, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul. • Penelitian ini berlokasi di Kota Pariaman, sedangkan peneliti akan meneliti di Kabupaten Bantul. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | Chrisantum Aji Paramesti (2011) | Kesiapsiagaan Masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu Terhadap Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. | Kesiapsiagaan masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami berada dalam kondisi tidak siap. Hal ini disebabkan masyarakat banyak yang belum mengetahui kerentanan wilayahnya terhadap bencana. Selain itu, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat membuat masyarakat belum terlalu jauh memikirkan untuk mengupayakan kesiapsiagaan dalam keluarga, terutama dalam hal penyediaan peralatan dan perlengkapan darurat serta pertimbangan pembuatan bangunan tempat tinggal yang tahan gempa dan/atau tsunami. | <ul style="list-style-type: none"> • Meneliti mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini meneliti kesiapsiagaan masyarakat, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul. • Lokasi penelitian ini di Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu, sedangkan peneliti akan meneliti di Kabupaten Bantul. |

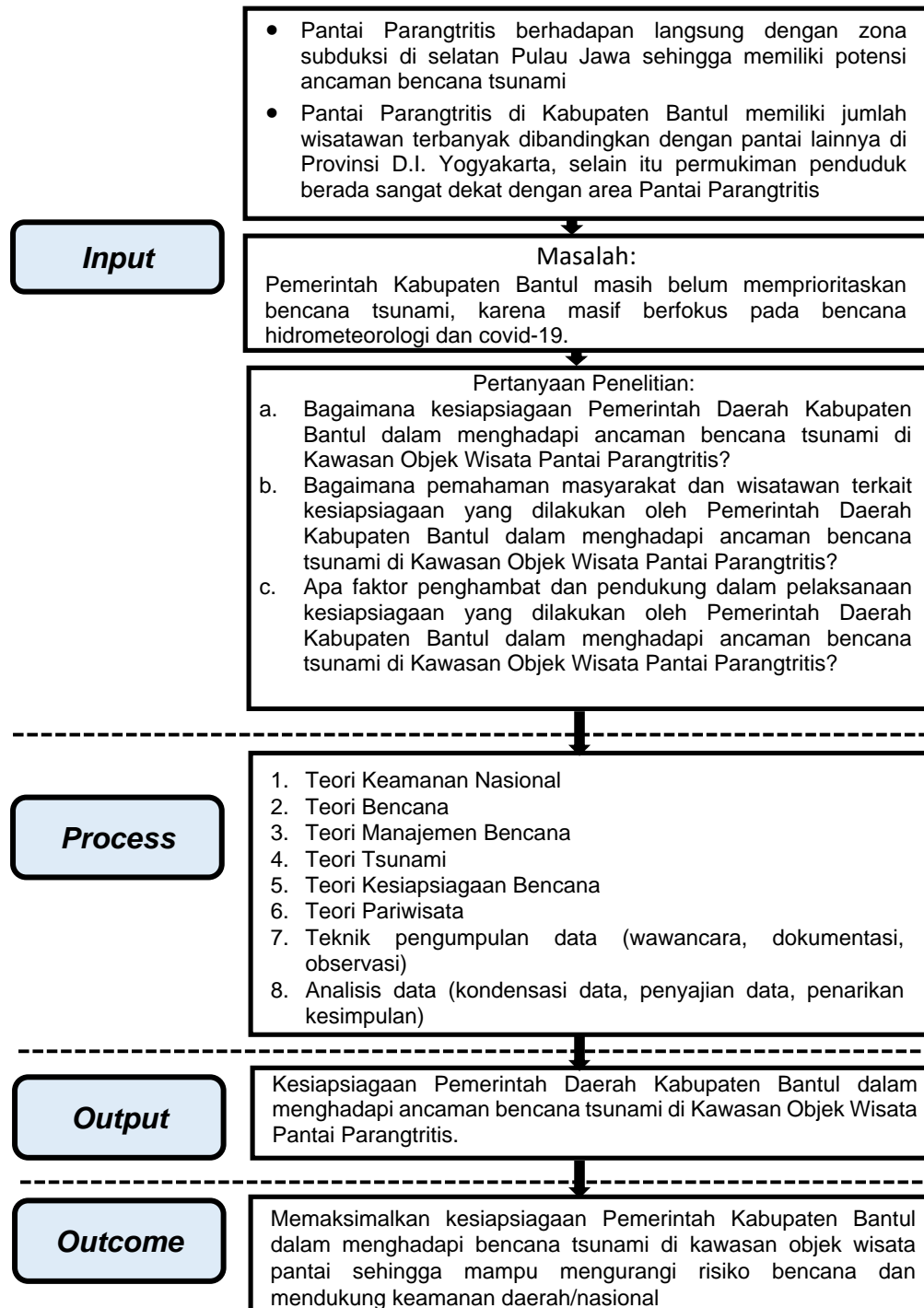
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|----------------------|---|---|---|---|
| 3 | Zikri Alhadi (2011). | Upaya Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami | Pemerintah Kota Padang sudah memperhatikan kesiapsiagaan dengan menginisiasi berbagai program kesiapsiagaan, namun program tersebut masih dalam tahap perencanaan. Secara umum edukasi masyarakat sudah mulai dilakukan walau masih difokuskan pada institusi Pendidikan. Pemerintah Kota Padang masih bergantung pada LSM dan koordinasi oleh BPBD Kota Padang masih lemah, selain itu belum memadainya sistem peringatan dini, jalur dan lokasi evakuasi juga menjadi kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Padang. | <ul style="list-style-type: none"> • Meneliti mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tsunami. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini meneliti mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bantul. • Penelitian ini berlokasi di Kota Padang, sedangkan peneliti akan meneliti di Kabupaten Bantul. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---------------------|---|---|--|--|
| 4 | Ujang Misron (2014) | Peran Pemerintah Lokal dalam Menghadapi Bencana Tsunami di Pacitan Jawa Timur | Walaupun Pacitan belum pernah terdampak tsunami secara langsung, tetapi pemerintah menyediakan informasi yang tepat kepada masyarakat dan memberikan tindak lanjut yang bermanfaat seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat. Yang perlu lebih ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas informasi kebencanaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kontrol dan monitoring atas kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan untuk menjamin masyarakat menerima dan melaksanakan program pemerintah dengan baik sekaligus menjaring masalah yang timbul di masyarakat terkait risiko bencana tsunami demi pembuatan kebijakan dan program pengurangan risiko bencana tsunami yang lebih tepat sasaran. | <ul style="list-style-type: none"> • Topik penelitian bencana Tsunami • Subjek yang diteliti adalah pemerintah lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pacitan, sedangkan peneliti akan meneliti di Kabupaten Bantul. |

Sumber: Andika Rahman dan Triyatno (2020), Chrisantum Aji Paramesti (2011), Zikri Alhadi (2011), Ujang Misron (2014). (Diolah kembali oleh Peneliti, (2021))

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan sistematika perumusan kerangka pemikiran sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah peneliti (2021)